



SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG
BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2024
(AUDITED)

UAKPA

005.01.1600.652080

PENGADILAN AGAMA BONTANG
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

Jl. AWANG LONG NO 69, Telp. 0548-23001
Website: <https://pa-bontang.go.id> e-
mail : pa-bontang@pta-samarinda.net
Bontang Kalimantan Timur 75313



LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(005.01.652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Untuk Periode Akhir Tahun 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01.1600.652080
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
AUDITED

Jl. AWANG LONG NO 69, Telp. 0548-23001 Website: <https://pa-bontang.go.id>
e-mail : pa-bontang@pta-samarinda.net
Bontang Kalimantan Timur 75313

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bontang, 20 Februari 2025
Sekretaris,

Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP.1985011702006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
RINGKASAN	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	5
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6
A. PENJELASAN UMUM	6
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang.....	6
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
A.3. Basis Akuntansi.....	8
A.4. Dasar Pengukuran	8
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	13
B.1. Pendapatan.....	13
B.2. Belanja	14
B.3. Belanja Pegawai.....	15
B.4. Belanja Barang.....	15
B.5. Belanja Modal.....	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	19
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	19
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	19
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	19
C.4. Piutang PNBP	20
C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	20
C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	20
C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar	20
C.8. Belanja Dibayar di Muka.....	21
C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	21
C.10. Persediaan	21
C.11. Persediaan yang Belum Diregister	22
C.12. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	22
C.13. Tagihan Penjualan Angsuran	22
C.14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	22
C.15. Tanah.....	23
C.16. Peralatan dan Mesin	23
C.17. Gedung dan Bangunan.....	24
C.18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24
C.19. Aset Tetap Lainnya.....	25
C.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	25
C.21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	25
C.22. Aset Tak Berwujud	26
C.23. Aset Lain-Lain.....	26
C.24. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26

C.25.	Uang Muka dari KPPN.....	27
C.26.	Utang kepada Pihak Ketiga.....	27
C.27.	Hibah Yang Belum Disahkan.....	27
C.28.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	27
C.29.	Pendapatan Diterima Dimuka	27
C.30.	Ekuitas.....	28
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	28
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	28
D.2.	Beban Pegawai	28
D.3.	Beban Persediaan	29
D.4.	Beban Barang dan Jasa	29
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	30
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	30
D.8.	Beban Bantuan Sosial	30
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	31
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31
D.11.	Pos Luar Biasa	31
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	32
E.1.	Ekuitas Awal.....	32
E.2.	Surplus (Defisit) LO	32
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	32
E.4.	Transaksi Antar Entitas	34
E.5.	Ekuitas Akhir	34
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	35
F.1.	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
F.2.	Pengungkapan Lain-Lain.....	35
	LAMPIRAN DAN DAFTAR	36

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jl. AWANG LONG NO 69, Telp. 0548-23001 Website: <https://pa-bontang.go.id>

e-mail : pa-bontang@pta-samarinda.net

Bontang Kalimantan Timur 75313

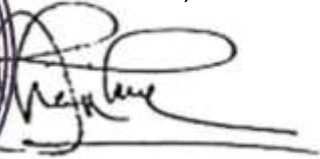
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bontang, 20 Februari 2025
Sekretaris,


Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP.1985011702006041001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang Samarinda Tahun 2021 AUDITED ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 AUDITED adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4,298,925 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 4,298,925.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 AUDITED adalah sebesar Rp. 3,462,144,684..atau mencapai 99,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3,487,693,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 7,641,995,363 yang terdiri dari:

1. Aset Tetap (neto) sebesar Rp 7,641,995,363; dan
2. Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.000.
3. Jumlah Kewajiban sebesar Rp 2.461.720

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 7,641,995,363.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4,298,925,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 3,392,639,754,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp (3,388,340,829,00) dari Kegiatan Operasional senilai Rp 3,392,639,754,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar RpRp0,00,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(3,388,340,829,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7,639,533,643 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (3,388,340,829) ditambah dengan koreksi yang menambah ekuitas senilai Rp (45,886,953.00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3,779,412,991 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 7,639,533,643,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2024 AUDITED disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.01.1600.652080)

PENGADILAN AGAMA BONTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN 2024 AUDITED DAN TAHUN 2023 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	4,298,925	4,298,925	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	4,298,925	4,298,925	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	4,298,925	4,298,925	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,487,693,000	3,462,144,684	(25,548,316)	99.27	2,993,859,000	2,965,126,078	28,732,922	99.04
1. Belanja Pegawai	2,036,630,000	2,011,391,802	(25,238,198)	98.76	1,898,116,000	1,870,927,482	27,188,518	98.57
2. Belanja Barang	1,090,863,000	1,090,552,882	(310,118)	99.97	1,095,743,000	1,094,198,598	1,544,404	99.88
3. Belanja Modal	360,200,000	360,200,000	0	100.00	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,487,693,000	3,462,144,684	(25,548,316)	99.27	2,993,859,000	2,965,126,078	28,732,922	99.04
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.01.1600.652080)
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	0	0	0	0
JUMLAH ASET LANCAR	0	0	0	0
ASET TETAP			0	
Tanah	2,042,591,548	2,042,591,548	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,981,640,878	2,563,836,878	417,804,000	16.30
Gedung dan Bangunan	6,109,001,000	5,845,037,768	263,963,232	4.52
Aset Tetap Lainnya	3,427,109	3,427,109	0	0.00
KUMULASI PENYUSUTAN	(3,494,665,172)	(3,157,879,425)	(336,785,747)	10.66
JUMLAH ASET TETAP	7,641,995,363	7,297,013,878	344,981,485	4.73
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,950,000	4,950,000	0	0.00
Aset Lain-lain	(4,950,000)	(4,950,000)	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET LAINNYA	7,641,995,363	7,297,013,878	344,981,485	4.73
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,461,720	2,665,444	(203,724)	(7.64)
Utang kepada Pihak Ketiga	2,461,720	2,665,444	(203,724)	(7.64)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,461,720	2,665,444	(203,724)	(7.64)
JUMLAH KEWAJIBAN				
EKUITAS				
EKUITAS	7,639,533,643	7,294,348,434	345,185,209	4.73
Ekuitas	7,639,533,643	7,294,348,434	345,185,209	4.73
JUMLAH EKUITAS	7,639,533,643	7,294,348,434	345,185,209	4.73
JUMLAH EKUITAS	7,641,995,363	7,297,013,878	344,981,485	4.73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,042,591,548	2,042,591,548	0	0.00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.01.1600.652080)

PENGADILAN AGAMA BONTANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

LAPORAN OPERASIONAL

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	0	0	0	
Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,298,925	0	4,298,925	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,298,925	0	4,298,925	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,298,925	0	4,298,925	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,011,391,802	1,857,853,482	153,538,320	8.264
Beban Persediaan	15,999,300	12,990,000	3,009,300	23.166
Beban Barang dan Jasa	628,265,865	709,755,355	(79,027,770)	(11.135)
Beban Pemeliharaan	373,588,304	315,277,740	58,310,564	18.495
Beban Perjalanan Dinas	70,033,969	63,846,545	6,187,424	9.691
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	290,898,794	317,954,554	(27,055,760)	(8.509)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,392,639,754	3,277,677,676	114,962,078	3.507
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,388,340,829)	(3,277,677,676)	(110,663,153)	3.376
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,388,340,829)	(3,277,677,676)	(110,663,153)	3.376
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,388,340,829)	(3,277,677,676)	(110,663,153)	3.376

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.01.1600.652080)
PENGADILAN AGAMA BONTANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN /PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,294,348,434	7,540,053,842	(245,705,408)	(3.26)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,388,340,829)	(3,277,677,676)	(110,663,153)	3.38
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(45,886,953)	(11,650,760)	(34,236,193)	293.85
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(45,886,953)	(11,650,760)	(34,236,193)	293.85
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,779,412,991	3,043,623,028	735,789,963	24.17
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	345,185,209	(245,705,408)	590,890,617	(240.49)
EKUITAS AKHIR	7,639,533,643	7,294,348,434	345,185,209	4.73

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 657/SEK/SK/X/2018. Entitas berkedudukan di Jalan Awang Long No69 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur 75313

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang berkomitmen dengan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menjadi lembaga yang dihormati, di mana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

- Misi Mahkamah Agung:
 - 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
- Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Bontang sebagai Visi dan Misinya.
- Visi Pengadilan Agama Bontang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Yang Agung”.
- Visi tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI (2010-2035) dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :
 - 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan
 - 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
 - 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
 - 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
 - 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
 - 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
 - 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
 - 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
 - 10) Modern dengan berbasis TI terpadu.
- Misi Pengadilan Agama Bontang adalah :
 - 1) Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang ;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang ;
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bontang ;
 - Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bontang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - 1) Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Agama Bontang yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
 - 2) Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Agama Bontang dalam wilayah hukumnya;
 - 3) Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Agama Bontang dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.
 - Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut :
 - 1) Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Agama Bontang satu tahun ke depan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
 - 2) Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Bontang.

Tujuan dan Sasaran Strategis PA Bontang

No	Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Tersusunnya dokumen perencanaan taktis strategis pengadilan Agama Bontang yang berfokus pada skala Prioritas strategic
2	Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama Bontang serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan
3	Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Bontang

A.2

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 AUDITED ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset pada Sakti adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4

Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

A.5.1. Pendapatan- LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.2. Pendapatan-LO

Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.3. Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.4. *Beban*

- Beban
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.5. *Aset*

- Aset
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar (1) *Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh Tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap (2) *Aset Tetap*

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap (3) *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Tahun 2023 tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Tahun 2023 selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

(4) *Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

(5) *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.5.6. Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 1) **Kewajiban Jangka Pendek**
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) **Kewajiban Jangka Panjang**
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, bahwa revisi DIPA telah dilakukan sebanyak 4 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2,036,630,000	2,011,392,524
Belanja Barang	1,090,863,00	1,090,552,882
Belanja Modal	376,200,000	360,200,000
Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid19	0	0
Jumlah Belanja	3,503,693,000	3,462,145,406

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp, 4,298,925 00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4,298,925,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0,00. Rincian pendapatan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	4,298,925	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	0	4,298,925	0

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 AUDITED mengalami penurunan sebesar (33) persen dibandingkan Tahun 2023 Audited yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,298,925	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	4,298,925	0	0

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp 3,462,144,684,00

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2024 AUDITED adalah sebesar Rp 3,462,144,684,00 atau 99.27% dari anggaran belanja sebesar Rp 3,487,693,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 AUDITED

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,036,630,000	2,011,391,802	99.27
Belanja Barang	1,090,863,000	1,090,552,882	98.76
Belanja Modal	360,200,000	360,200,000	99.97
Total Belanja Kotor	3,487,693,000	3,462,144,684	100.0
Pengembalian		0	0
Jumlah	3,487,693,000	3,462,144,684	99.27

Dibandingkan dengan Tahun 2023 Audited, Realisasi Belanja Tahun 2024 AUDITED mengalami kenaikan 00,23% dibandingkan realisasi belanja pada Tahun 2023 Audited.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,011,391,802	1,870,927,482	00,23
Belanja Barang	1,090,552,882	1,094,198,596	00,19
Belanja Modal	360,200,000	0	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	3,462,144,684	2,965,126,078	12,36

3.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp 2,011,391,802,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp 2,011,391,802,00 dan Rp 1,870,927,482,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2024 AUDITED mengalami kenaikan sebesar 28,64 persen dari Tahun 2023 Audited.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	785,222,120	788,860,040	3.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,083	13,382	3.00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	67,998,720	62,464,408	10.00
Belanja Tunj. Anak PNS	22,319,198	21,505,952	10.00
Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	24,900,000	5.00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	765,570,000	634,520,000	20.14
Belanja Tunj. PPh PNS	97,475,463	67,807,214	(45.20)
Belanja Tunj. Beras PNS	51,200,940	53,373,540	(10.22)
Belanja Uang Makan PNS	122,561,000	150,158,000	(30.00)
Belanja Tunjangan Umum PNS	7,445,000	10,220,000	(25.00)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	63,450,000	57,105,000	20.00
Jumlah Belanja Kotor	2,011,392,524	1,870,927,536	28,64
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja	2,011,392,524	1,870,927,536	28,64

3.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp 1,090,552,882⁰⁰

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp 1,090,552,882,00 dan Rp 1,094,198,596,00. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 AUDITED mengalami penurunan sebesar 4,80% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 Audited. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang non operasional dan belanja pemeliharaan sepanjang Tahun 2024 AUDITED.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	525,093,418	571,024,027	10,12
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	852,154	1,007,500	(20,58)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	32,520,000	58,552,000	(20,12)
Belanja Barang Operasional Lainnya	10,498,500	1,646,500	(90,44)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		7,268,000	(100,00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,999,300	12,990,000	42,03
Belanja Langganan Telepon	3,105,756	4,120,804	30,13
Belanja Langganan Air	4,084,000	3,681,500	30,15
Belanja Sewa	54,777,481	54,783,980	10,42
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234,710,711	197,412,795	60,22
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11,681,500	0	100
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127,196,093	117,864,945	(10,13)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,033,969	63,846,545	20,10
Jumlah Belanja Kotor	1,090,552,882	1,094,198,596	20,15
Pengembalian Belanja	0	0	(100,00)
Jumlah Belanja	1,090,552,882	1,094,198,596	20,15

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp 360,200,000,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp 360,200,000,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 AUDITED mengalami penurunan sebesar 100% persen dibandingkan Tahun 2023 Audited disebabkan oleh realisasi anggaran belanja modal untuk Tahun 2024 AUDITED lebih kecil daripada Tahun 2023 Audited. penurunan yang signifikan ini akibat belanja modal belum terealisasi

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360,200,000	0	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	360,200,000	0	100
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	360,200,000	0	100

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada Tahun 2024 AUDITED tidak mengalami perubahan sebesar 0 persen dibandingkan Tahun 2023 Audited.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited**

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tana	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin
Rp 360,200,000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 AUDITED adalah sebesar Rp 360,200,000,00 atau mengalami penurunan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Audited sebesar Rp0,00.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited**

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360,200,000	0	100
Jumlah Belanja Kotor	360,200,000	0	100
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	360,200,000	0	100

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 AUDITED tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2030 Audited.

**Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited**

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 AUDITED tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2023 Audited.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited**

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

*Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Lainnya
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 AUDITED tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2023 Audited. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal lainnya selama Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited.

B.5.6. Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada Tahun 2024 AUDITED tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2023 Audited. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja bantuan sosial selama Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rekening Bank	0	0
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

4.4 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0,00

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

4.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

4.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian
Lancar TPA
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

4.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih–
Piutang Lancar
Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar
di Muka Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2023
Pembayaran Domain dan Hosting	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah		0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
NIHIL	0	0
	0	0
Jumlah	0	0
Selisih dengan Neraca	-	-

Persediaan

Persediaan
Rp 15,999,300,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 15,999,300,00 dan Rp 12,990,000,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	15,999,300	12,990,000
Barang untuk Pemeliharaan	-	0
Bahan Baku	-	0
Jumlah	15,999,300	12,990,000

Sampai dengan periode yang berakhir per 31 Desember 2024, seluruh pencatatan bahan/barang persediaan dikelompokkan ke dalam barang konsumsi dan barang persediaan untuk pemeliharaan dan berdasarkan hasil opname fisik dinyatakan bahwa semua barang persediaan dalam kondisi baik.

4.11. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan yang
Belum Diregister
Rp0,00

Saldo Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan yang Belum Diregister muncul akibat satuan kerja belum melakukan penyelesaian melalui transaksi GUP atas pembelian barang-barang persediaan.

4.12. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
TP/TGR Rp0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Debitur	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

4.13. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Debitur	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	NIHIL	0	0
2		0	0
3		0	0
Jumlah		0	0

4.14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

15. Tanah
Rp 2,042,591,548,00

Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja di wilayah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2,042,591,548,00 dan Rp 2,042,591,548,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	417,804,000
Hibah Masuk	417,804,000
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	0
Akumulasi Penyusutan	(4,950,000)
Saldo per 31 Desember 2024	0

16. Peralatan dan Mesin
Rp 2,981,640,878,00

Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 2,981,640,878,00 dan Rp 2,563,836,878,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2,981,640,878
Mutasi Tambah	37.500.000
Pembelian	37.500.000
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transaksi Normalisasi BMN	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Transfer Keluar	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2024	7,641,995,363
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(4,950,000)

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang untuk aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

17
Gedung dan
Bangunan
Rp 6,109,001,000,00

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 6,109,001,000,00 dan Rp 5,845,037,768,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	263,963,232
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Pengembangan Nilai Aset	263,963,232
Saldo Awal	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2024	6,109,001,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

18
Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Atas aset jalan, irigasi dan jaringan ini dengan mengacu pada hasil kesepakatan dan kebijakan dari Mahkamah Agung RI bahwa untuk setiap aset berupa jalan, jembatan, jaringan dan irigasi untuk yang instalasinya melekat pada gedung agar diakui sebagai aset gedung dan bangunan mengingat aset jalan, jembatan, jaringan dan irigasi bukan merupakan aset yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan, maka seharusnya di seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur sudah tidak ada lagi yang memiliki aset ini.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

C.19.
Aset Tetap Lainnya
Rp 3.427.109,00

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 3.427.109,00 dan Rp 3.427.109,00. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	3.427.109
Mutasi tambah:	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	3.427.109
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	3.427.109

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.20.
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.21.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp 2.729.899.545,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp 2.729.899.575,00 dan Rp 2.352.244.446,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.22.
Aset Tak Berwujud
Rp 4.950.000,00

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp4.950.000,00 dan Rp4.950.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud salah satunya berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.950.000
Mutasi tambah:	0
Software	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2024	4.950.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	4.950.000
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

4.23. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

4.24. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp 4.950.000,00

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp 4.950.000,00 dan Rp 4.950.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tidak Berwujud	4.950.000	4.950.000	0
2	Aset Lain-Lain	0	0	0
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	4.950.000	4.950.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

4.25. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Seluruh Uang Muka dari KPPN ini per 31 Desember 2024 telah selesai dilakukan Ganti Uang Persediaan (GUP) Nihil.


*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp12.350.241,00*

Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 12.350.241,00 dan Rp 14.320.702,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan bahwa Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa uang makan Desember sedangkan Belanja Barang yang Masih Dibayar berupa tagihan listrik, air, telpon dan pos. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4.166.000	
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	8.184.241	
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	0	
Total	12.350.241	


*Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0,00*

Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hibah yang belum disahkan merupakan hibah yang sampai dengan tanggal pelaporan sudah diterima dan dicatat oleh satuan kerja pemerintah namun proses registrasinya masih dalam proses pengajuan dan pengesahan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.


*Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp0,00*

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.


*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00*

Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

3.30. Ekuitas

Ekuitas
Rp 7,639,533,643,00

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 7,639,533,643,00 dan Rp 7,294,348,434,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

U.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNPB
Rp 4,298,925,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4,298,925,00 dan Rp 0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0
Pendapatan PNPB	4,298,925	0	100

Terhadap pendapatan yang diperoleh dalam laporan operasional ini, diperoleh dari total pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ditambah Pendapatan non kas dan piutang atau pendapatan ditangguhkan dikurangi dengan Pendapatan dibayar di muka.

U.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp 2,011,391,802,00

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp, 2,011,391,802,00 dan Rp 1,857,853,482,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2,011,391,802	1,857,853,482	15,94
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	2,011,391,802	1,857,853,482	15,94

0.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp
15,999,300,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp 15,999,300,00 dan Rp 12,990,000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 naudited dan Tahun 2023 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik
			(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	15,999,300	12,990,000	19
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
Beban Persediaan barang hasil sitaan	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	15,999,300	12,990,000	19

0.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp 630,727,58,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp 630,727,58,00 dan Rp 709,755,355,00. Dibandingkan dengan Tahun 2023 Audited, Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 Audited mengalami penurunan sebesar 12,20%.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2024 AUDITED. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2023	
Belanja Keperluan Perkantoran	525,093,418	571,024,027	2,59
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	852,154	1,007,500	(7,65)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	32,520,000	58,552,000	(20,72)
Belanja Barang Operasional Lainnya	10,498,500	1,646,500	9.00
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	7,268,000	(100)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,999,300	12,990,000	(19.00)
Belanja Langganan Telepon	3,105,756	4,120,804	(8.42)
Belanja Langganan Air	4,084,000	3,681,500	19,74
Belanja Sewa	54,777,481	54,783,980	(10.00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234,710,711	197,412,795	50.12
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11,681,500	0	100
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127,196,093	117,864,945	(50.15)
Jumlah	1,090,552,882	1,094,198,596	(7,20)

0.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp747.086.935,00

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp747.086.935,00 dan Rp526.017.979,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian

beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan
Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited**

Beban Barang Non Operasional - Darurat Bencana	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234,710,711	197,412,795	58,52
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11,681,500	0	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127,196,093	117,864,945	27,92
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0
Jumlah	374.588.304	315.227.740	2,30

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp 70,033,969,00*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp 70,033,969,00 dan Rp 63,846,545,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan daerah dan surveillance ZI dan APM. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited**

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Dinas Biasa <i>Konsultasi</i>	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Biasa	70,033,969	63,846,545	(10,02)
Jumlah	70,033,969	63,846,545	(15,10)

D.7.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8.

Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,00*

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp290,898,794,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp 290,898,794,00 dan Rp 317,954,554,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10.

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.11

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
RpRp0,00,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0
Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga	0	0	0
Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	0	0	0
Jumlah	0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp 7,294,348,434,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 7,294,348,434,00 dan Rp 7,540,053,842,00.

1.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit-LO
Rp (3,388,340,829.00)

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited adalah sebesar Rp (3,388,340,829,00) dan Rp(3,277,677,676.00) Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

1.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3.1. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang
Menambah/Mengur
angi Ekuitas Rp0,00

Nilai Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset Rp (45,886,953.00)

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited adalah sebesar Rp (45,886,953.00) dan Rp (11,650,760,00) Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah/(kurang) atas nilai persediaan untuk Tahun 2021 AUDITED dan Tahun 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2023 AUDITED adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp (45,886,953,00)

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2023 Audited adalah sebesar Rp (45,886,953,00) dan Rp(11,650,760.00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021 AUDITED

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(11,650,760.00)
Jumlah	(11,650,760.00)

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi terjadi di satuan kerja terhadap asset-aset yang tercatat dalam kelompok asset yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI namun hanya perubahan nama dan kodifikasi asetnya dan tidak merubah nilainya.

E.3.6. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun 2024 AUDITED dan Tahun 2024 Audited adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	0
Ekuitas Transaksi Lainnya	0
Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0
SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0
Penyesuaian SAL BLU	0
Jumlah	0

4. sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Keluar/Transfer Masuk Per Satker

No	Kode	Uraian	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk
-	-	0	0	-	-	-
		JUMLAH	0		JUMLAH	-

E.4.1. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 3,779,412,991,00 an pada tahun 2023 sebesar RP 3,043,623,028.

Entitas Rp
3,779,412,991,00
E.42

Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.345,185,209,00 dan pada tahun 2023 sebesar RP (245,705,408).

Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp 7,639,533,643.00

Nilai Ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 7,639,533,643,00 dan Rp 7,294,348,434,00.

E.5. F .PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

Kejadian
Penting Setelah
Tanggal

1. Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.
2. Terdapat Jurnal Penyesuaian Pengesahan Hubah Yang telah dilakukan pengesahan yaitu:
 - a. Hibah dari Comtelindo Bontang berupa Hibah Langsung Barang (Ac 1 PK, Infocus, dan Speker) kepada PA Bontang, pengesahannya dilakukan secara hibah langsung TYAL (133211) yang Bast penyerahan Barangnya Pada bulan Desember tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp.11.500.000
 - b. Hibah dari BRI Cabang Bontang berupa Hibah Langsung Berupa Barang (1 Unit AC 2 PK) Kepada di PA Bontang yang pengesahannya dilakukan secara hibah langsung (133211) yang Bast penyerahan Barangnya pada Bulan Februari Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp. 6.500.000
 - c. Hibah dari Pemerintah kota Bontang berupa Hibah Langsung Renovasi sebagian Gedung Kantor PA Bontang (131211) yang Bast penyerahan Barangnya pada Bulan April Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp. 263.963.232
 - d. Hibah dari IMM (PT Indominco Mandiri) berupa Hibah Langsung Berupa Barang (2 Unit TV) Kepada di PA Bontang yang pengesahannya dilakukan secara hibah langsung (133211) yang Bast penyerahan Barangnya pada Bulan Juli tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp. 12.124.000

3. Terdapat Jurnal Penyesuaian Beban Yang Masih Harus Dibayar yaitu:

- Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Bulan Desember 2024 sebesar Rp 26.000 Rp 60.000.000
- Beban Langganan Air Bulan Desember 2024 sebesar Rp 131.750
- Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2024 sebesar Rp 164.719
- Beban Keperluan Perkantoran Belanja Barang Jasa Langganan Internet Bulan Desember 2024 sebesar Rp 2.149.284.

G. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

G1. Pengungkapan Capaian Rincian Output per Fungsi APBN

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari mana pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan bagi Satker **paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya**. Pengadilan Agama yakni Satker 652080 Badan Urusan Administrasi

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	ian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	005	652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	Nilai	100.00	19.56	25.00	100.00	0.00	100.00	0.00	37.93		0.00	
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.93	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00				
					Nilai Aspek	59.78		75.00				0.00				

LAMPIRAN